

NASKAH PUBLIKASI

**PEMBERDAYAAN DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS
(PDM.DKE) EKONOMI KOTA SURAKARTA
(Studi Tentang Program Dana Bergulir Di Kecamatan Laweyan)**



Oleh :

YANUAR ARDIAN PUTRA
NIM : C.100.100.120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal : Agustus 2014

Pembimbing I



(Wardah Yuspin S.H., M.Kn., Ph.D.)

Pembimbing II



(Inayah S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti S.H., M.Hum.)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YANUAR ARDIAN PUTRA
NIM : C 100 100 120
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis : Skripsi
Judul : PEMBERDAYAAN DAERAH DALAM MENGATASI
DAMPAK KRISIS EKONOMI (PDM.DKE) KOTA
SURAKARTA (Studi Tentang Program Dana Bergulir di
Kecamatan Laweyan)

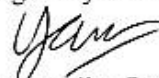
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih medikan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 Juli 2014

Yang menyatakan


(Yanuar Ardian Putra)

**PEMBERDAYAAN DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS
EKONOMI KOTA SURAKARTA**

(Studi Tentang Program Dana Bergulir Di Kecamatan Laweyan)

YANUAR ARDIAN PUTRA

NIM : C 100 100 120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

yanuar_dheputra@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan, (2) Untuk mengetahui Kelebihan dan Kelemahan dari Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan, dan (3) Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang sering muncul dalam Program tersebut serta mengetahui langkah-langkah yang dilakukan atau ditempuh apabila terjadi *Wanprestasi*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PDM.DKE di Kecamatan Laweyan yaitu berupa pemberdayaan yang meliputi penyadaran, peningkatan kapasitas, dan juga pendayagunaan dengan sasaran program rumah tangga miskin atau ekonomi lemah. Dalam program ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Persoalan yang dihadapi yakni dalam pelaksanaan program masih sering ditemui anggota masyarakat yang melakukan wanprestasi dan sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi moral saja.

Kata kunci : Pemberdayaan daerah, PDM.DKE, Dana Bergulir.

ABSTRACT

The objective of this study is (1) To know the process of the implementation of the program in the District Revolving Fund PDM.DKE Laweyan, (2) To know the Pros and Cons of the Revolving Fund Program Laweyan PDM.DKE in the District, and (3) To know the issues which often appear in the program and know the steps taken or taken in the event of Default. Based on the results of this study concluded that the implementation of the program in the district PDM.DKE Laweyan the form of empowerment that includes awareness, capacity building, and empowerment programs targeting the poor or weak economy. In this program there are some advantages and disadvantages. Problems faced in the implementation of the program is still frequently encountered members of the community who are in default and sanctions imposed sanctions only moral course. Keywords: Empowerment areas, PDM.DKE, Revolving Fund.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, sehingga dari tahun 1999 hingga saat ini Negara Indonesia giat melakukan pembangunan-pembangunan nasional disegala bidang, terutama dalam bidang pembangunan yang bertujuan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Seperti halnya dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perwujudan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera yakni salah satunya adalah dengan upaya atau program dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Program yang dilakukan secara langsung melalui program pemerintah dengan bantuan beberapa pihak seperti Bank Dunia, lembaga-lembaga, dan departemen-departemen. Program tersebut diantaranya seperti: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM.DKE), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Banyak berbagai program yang dilakukan pemerintah seperti diatas dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan dan kelurahan-

kelurahan yang dinilai tergolong masuk dalam kategori miskin, diantara salah satunya yaitu kelurahan-kelurahan pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, yang termasuk salah satu daerah yang masuk dalam daftar Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM.DKE) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai pedagang, buruh bangunan maupun ibu rumah tangga yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup. Akan tetapi lahan pedagang dalam kelurahan tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil yang mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas, maka salah satu diantara banyak pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang. Sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam kepada pihak pemerintah sebagai pemodal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Berhubungan dengan hal tersebut, usaha kecil seperti berdagang misalnya perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. Banyak masyarakat Kecamatan Laweyan yang berdagang kecil-kecilan seperti berjualan makanan atau jajanan-jajanan pasar, sembako, dan barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan berdagang ini dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kehidupan dalam keluarga sehari-hari.

Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM.DKE) dalam prakteknya banyak mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para peminjam atau masyarakat yang meminjam

dana. Beberapa hambatan dan kendala dari program itu adalah pengembalian dana yang dilakukan terlambat atau telat bahkan terkadang tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam musyawarah bersama, dan seringkali peminjam tidak mau membayar dikarenakan belum ada dana atau uang.

Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada ketentuan pelaksanaan program pemerintah Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi di Kecamatan Laweyan. Perumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan. (2) Apa yang menjadi Kelebihan dan Kelemahan dari Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan. (3) Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh apabila terjadi *Wanprestasi*.

Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk menjelaskan proses pelaksanaan Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan. (2) Untuk menjelaskan Kelebihan dan Kelemahan dari Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan. (3) Untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan atau ditempuh apabila terjadi *Wanprestasi*.

Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan serta suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan

metode tertentu,¹ sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang pelaksanaan Program Dana Bergulir PDM.DKE yang ada di kecamatan Laweyan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.² Dalam hal ini penulis berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian mengenai Pelaksanaan Program PDM.DKE yang ada di kecamatan Laweyan kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan sumber: (a) Data primer, data yang diperoleh melalui penelitian pada Program Dana Bergulir PDM.DKE yang ada di kecamatan Laweyan Surakarta. (b) Data sekunder, merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, koran, majalah, internet serta dokumen-dokumen yang ada dan mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Metode pengumpulan data: (a) wawancara, (b) dokumentasi, (c) penelitian pustaka.

Metode analisis data, setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, karena data yang terkumpul merupakan data hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya

¹ Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, hal. 5.

²Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum tentang Program PDM.DKE di Kecamatan Laweyan Surakarta

PDM.DKE adalah program JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang berisikan Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi.⁴ Makna dari pemberdayaan itu sendiri merupakan suatu program, upaya, usaha-usaha, atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan juga merupakan cara pembangunan yang mengacu pada pembangunan yang berpusat pada rakyat, karena dalam prosesnya mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat.⁵

Dengan lingkup kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat yang tergolong miskin atau ekonomi lemah). Melalui Program PDM.DKE tersebut diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Program penyaluran kredit/dana bergulir merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup, masyarakat, menciptakan keberdayaan

³Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV Rajawali, hal. 13.

⁴ Lili Suryani, 2001, *Tesis Permasalahan dan Perumusan Seleksi Peserta Program PDM-DKE*, Jakarta : Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, hal. 33.

⁵Lili Suryani, *Ibid*, hal. 15.

masyarakat miskin. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan di tandai dengan penduduk miskin yang menjadi sejahtera dan mandiri melalui penciptaan kesempatan kerja yang meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.⁶

Pelaksanaan Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan

Adapun pelaksanaan PDM.DKE program Dana Bergulir di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, MAK Sosialisasi, merupakan Musyawarah Antar Kecamatan tahap pertemuan antar kecamatan untuk sosialisasi awal dengan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan PDM.DKE serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar kecamatan.⁷

Kedua, musyawarah kelurahan sosialisasi, merupakan musyawarah tahap kelurahan yang dilaksanakan segera setelah musyawarah antar kecamatan sosialisasi untuk memilih orang-orang terpilih yang nantinya akan dipilih menjadi pengurus yakni Ketua, Sekretaris, Fasilitator, dan Bendahara Tim Penggerak Kelurahan (TPK).⁸ Telah dipilih pengurus TPK yaitu Bapak Warjito sebagai Ketua, Ibu Rusmarheny sebagai Fasilitator, Bapak Jamri Sutrisno sebagai Sekretaris, dan Saudara Avian Putra sebagai Bendahara dengan dihadiri oleh Kepala Kelurahan, Aparat kelurahan, dan Wakil Rumah Tangga Miskin kelurahan. Musyawarah ini dilakukan ditingkat kelurahan atau hanya dalam lingkup satu kecamatan saja.

⁶ Razib Daly Indra Nugraha, "Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pasir", 7 Maret 2014, [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Journal%20\(03-07-14-02-22-57\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Journal%20(03-07-14-02-22-57).pdf) diunduh pada tanggal 2 April 2014, pukul 12:10.

⁷ Warjito, Ketua TPK (Tim Penggerak Kelurahan), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 13.30.

⁸ Warjito, Ketua TPK (Tim Penggerak Kelurahan), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 13.30.

Ketiga, penggalan gagasan, merupakan proses untuk menentukan kriteria-kriteria masyarakat yang berhak menerima dana bantuan.

Keempat, pendataan masyarakat, merupakan tahap dimana masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan program Dana Bergulir ini didata oleh anggota Tim Penggerak Kelurahan (TPK).

Kelima, penetapan persyaratan, suatu penetapan persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana bantuan ini adalah: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), keterangan jenis usaha, adanya surat kesanggupan pembayaran, jangka waktu pinjaman, dan angsuran.

Keenam, verifikasi, merupakan proses layak atau tidaknya suatu masyarakat yang dinyatakan berhak diberikan dana bantuan atau tidak. Apabila dinyatakan berhak diberikan dana bantuan maka masyarakat tinggal menunggu proses pencairan dana.

Ketujuh, pencairan dana, proses pencairan dana ini dilakukan pada tiap-tiap kantor kelurahan dengan dihadiri oleh Kepala Kelurahan dan beserta semua pengurus TPK. Selanjutnya pengurus TPK memberikan surat yang berupa Kartu Kendali antara pengurus TPK dengan anggota masyarakat yang menerima dana bantuan. Perjanjian ini haruslah memenuhi persyaratan sahny suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah. Syarat sahny suatu perjanjian yang sesuai dengan pasal 1320 KUHPerd data yaitu: sepakat, cakap membuat perjanjian, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Kedelapan, penerimaan dana, proses penyerahan dana kepada masyarakat dilakukan di rumah Bendahara dari pengurus TPK. Setelah dana diberikan kepada

masyarakat, selanjutnya masyarakat diberi kartu pengendalian yang digunakan sebagai bukti bahwa setiap bulannya nanti masyarakat harus membayar secara rutin sehingga dalam laporan kepada ketua TPK tidak mengalami kesulitan.

Kesembilan, sistem pembayaran, pengaturan tentang tata cara pembayarannya adalah sebagai berikut: (a) setiap bulan masyarakat diwajibkan membayar cicilan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama, dimana kesepakatan biasa dilakukan adalah pembayaran paling lambat harus dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya sebanyak 10x selama dalam satu tahun, dan (b) jumlah cicilan pembayaran yang wajib dibayarkan ditambah dengan dana pelestarian sebesar 10% dari total dana yang diterima. Misalnya dana yang diterima Rp 300.000,- maka biaya yang harus dibayar tiap bulannya adalah Rp 33.000,- sebanyak 10x selama dalam kurun waktu maksimal 12 bulan.

Kelebihan dan Kelemahan Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan

Kelebihan dari program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan ini adalah:⁹

Pertama, membantu mereka (masyarakat yang menerima dana bantuan) yang mempunyai usaha kecil-kecilan supaya dapat tetap berjalan meskipun dana yang diberikan hanya kecil.

Kedua, membangkitkan kembali semangat masyarakat yang terkena PHK untuk kembali berusaha memperoleh lapangan pekerjaan meskipun telah terkena PHK dari instansi, perusahaan, maupun tempat kerjanya dahulu.

⁹Rusmarheny, Fasilitator TPK (Tim Penggerak Kelurahan), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 Mei 2014, pukul 11.15.

Ketiga, membantu masyarakat yang mempunyai usaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya menjadi yang lebih besar dan bermanfaat.

Keempat, menekan angka kemiskinan yang terjadi dilingkungan kelurahan maupun lingkungan kecamatan.

Kelima, mengurangi angka pengangguran karena dalam prakteknya banyak warga di Kecamatan Laweyan yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk berwirausaha berdagang.

Keenam, meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin di kelurahan maupun kecamatan dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Ketujuh, meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Kelemahan dari program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan ini adalah:¹⁰

Pertama, banyak masyarakat yang telat dalam melakukan pembayaran atau bahkan terkadang terjadi kredit macet.

Kedua, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ini adalah uang negara sehingga dalam upaya pembayaran cicilan tiap bulannya tidak dianggap penting.

Ketiga, banyak masyarakat yang bahkan dalam melakukan pembayaran masih kurang dan hanya diam saja karena mengingat dalam program ini tidak ada sanksi hukumnya.

¹⁰Rusmarheny, Fasilitator TPK (Tim Penggerak Kelurahan), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 Mei 2014, pukul 11.15.

Keempat, sanksi dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat yakni hanyalah sebatas sanksi moral saja yaitu berupa sanksi pengucilan atau cemoohan dari masyarakat.

Kelima, masih lemahnya hukum atau aturan yang mengikat program-program Pemerintah seperti PDM-DKE ini karena mengingat tidak ada sanksi jika ada anggota masyarakat yang melanggar atau melakukan wanprestasi.

Langkah-langkah yang Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi

Persoalan-persoalan muncul dalam PDM.DKE program Dana Bergulir di Kecamatan Laweyan ini antara lain:

Pertama, karakter individu-individu yang tidak bertanggung jawab, setiap orang mengetahui akan adanya hak dan kewajiban masing-masing sebagai makhluk sosial, namun kesemuanya itu tidak terlepas dari akal dan pikiran masing-masing manusia. Manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tentunya pasti mempunyai akal, pikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut membuat manusia ada yang berwatak baik dan ada pula manusia yang berwatak buruk.

Kedua, kegagalan usaha, dalam menjalankan setiap usaha membutuhkan upaya yang keras serta modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut. Namun tidak semua manusia pasti akan sukses dalam menjalankan roda usahanya, tentunya ada yang berhasil dan ada yang tidak.

Ketiga, masyarakat ada yang masih berasumsi bahwa dana merupakan uang negara. Memang benar bahwa program PDM.DKE program Dana Bergulir ini asal muasal dananya memang dari Pemerintah. Dengan adanya asumsi seperti itu

masyarakat sering dalam pengembalian dananya mengalami keterlambatan atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan diatas dapat dilakukan upaya dengan berbagai cara antara lain:¹¹

Pertama, adanya pertemuan rutin, pertemuan rutin ini harus dilaksanakan guna untuk meningkatkan kebersamaan serta memupuk tanggung jawab anggota TPK dimana dalam pertemuan ini membahas tentang siapa saja anggota masyarakat yang sering membayar telat dan siapa saja yang membayar tepat waktu. Apabila ada yang membayar sering telat atau tidak pada waktunya, semua anggota berusaha untuk memberi pengertian dan masukan tentang perlunya pengembalian tepat pada waktunya. Jika dalam pengembalian masih saja tidak pada waktunya nantinya akan diberi Surat Peringatan dari anggota TPK dan akan diberikan raport merah (dicap buruk dimata masyarakat).

Kedua, pendekatan persuasif, pendekatan ini dapat dilakukan oleh anggota TPK dan dapat difasilitasi atau didampingi oleh Konsultan. Dalam hal ini yang dimaksud Konsultan adalah tenaga ahli yang disediakan oleh Pemerintah

Ketiga, melakukan kerja sama atau birokrasi desa atau tokoh masyarakat dan atau tokoh agama. Dengan adanya kerja sama dengan birokrasi desa atau tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, diharapkan masyarakat dan pelaku program ini dapat memahami dan mengerti dengan jelas dan benar bahwa program Dana Bergulir ini memang benar-benar program yang serius dan murni diperuntukkan bagi mereka rumah tangga miskin.

¹¹Warjito, Ketua TPK (Tim Penggerak Kelurahan), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 13.30.

Keempat, seni penanganan, dalam hal ini adalah penanganan dengan cara untuk pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan cara atau sistem yang lain dari biasanya. Dalam melakukan pendekatan hendaknya dilakukan secara tidak langsung atau secara perlahan dengan tidak langsung membahas pokok permasalahan, melainkan dengan melakukan pembicaraan secara mendalam dan terarah dengan basa basi terlebih dahulu mengenai hal-hal diluar program ini contohnya seperti : kegiatan sehari-hari, membicarakan pekerjaan, sehingga dapat mengetahui apakah benar-benar mempunyai uang atau tidak. Pendekatan seperti ini dalam prakteknya sering kali berhasil dan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan PDM.DKE di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, awal mula sebelum program ini dilaksanakan adalah dengan mengadakan sosialisasi dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Dimana dalam program tersebut memberikan dana bantuan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu atau miskin, yang nantinya sebagai modal dalam berwirausaha, dan pengembalian dananya dibayarkan dengan cara cicilan tiap bulan selama 10 bulan atau maksimal 12 bulan terhitung sejak dana bantuan diterima.

Kedua, dalam praktek pelaksanaan dilapangan program PDM.DKE ini timbul beberapa kelemahan diantaranya tidak adanya sanksi hukum bagi masyarakat yang menerima dana bantuan yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi.

Ketiga, upaya yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi adalah dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas segala upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Saran

Hendaknya Pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada masyarakat dengan tidak meminjam uang kepada Bank Dunia, seperti halnya dalam PDM.DKE program Dana Bergulir ini karena masyarakat awam banyak yang belum menyadari bahwa Pemerintah dalam mengeluarkan program PDM.DKE ini meminjam uang dari Bank Dunia.

Dalam hal pemberian dana kepada masyarakat miskin seharusnya disertai dengan pemberian menggunakan jaminan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak supaya masyarakat sadar dan mempunyai kewajiban dalam hal pengembalian yang tepat waktu dan tidak terlambat.

Sebaiknya tata aturan dalam program yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti PDM.DKE diatur secara jelas dan tegas sanksi hukumnya, karena mengingat dalam hal ini bila terjadi pelanggaran hukum atau *wanprestasi* tidak ada upaya hukum sama sekali tetapi hanya berupa sanksi moral yakni sanksi kucilan dan cemoohan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lili Suryani, 2001, *Tesis Permasalahan dan Perumusan Seleksi Peserta Program PDM-DKE*, Jakarta : Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.

Nugraha, Razib Daly Indra, *Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pasir*, 7 Maret 2014, [http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id/site/wp.content/uploads/2014/03/Journal%20\(03-07-14-02-22-57\).pdf](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id/site/wp.content/uploads/2014/03/Journal%20(03-07-14-02-22-57).pdf) diunduh pada tanggal 2 April 2014, pukul 12:10.

Rusmarheny, Fasilitator TPK (Tim Penggerak Kelurahan), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 Mei 2014, pukul 11.15.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV Rajawali.

Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press.

Warjito, Ketua TPK (Tim Penggerak Kelurahan), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 13.30.